

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PEMERINTAHAN

Sistem E-budgeting Baru di Januari 2020

JAKARTA, KOMPAS — Dalam sesi wawancara bersama Kompas TV, Sabtu (2/11/2019), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sistem e-budgeting yang digagas saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta masih perlu diperbaiki. Walaupun berkonsep digital, proses verifikasi anggaran masih dilakukan manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan.

"Sistem itu tidak melakukan verifikasi. Kalau menerima input anggaran yang tidak masuk akal seharusnya sistem itu memberikan *flag*. Kami melihat kenyataan itu sejak tahun sebelumnya," kata Anies.

Untuk memperbaiki sistem e-budgeting, Anies sedang berupaya memperbarui sistem yang ditargetkan bisa digunakan mulai Januari 2020. "Dalam setiap organisasi, pasti ada yang rajin, tidak rajin, serta ada yang jujur dan tidak jujur. Itu fenomena manusia. Oleh karena itu, kami harus buat sistem yang memaksa orang jadi rajin dan jujur," ujar Anies sambil menekankan rencana pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar itu masih berupa rancangan yang akan dibahas dan bukan anggaran.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lisman Manurung, menegaskan, lembaga eksekutif serta legislatif harus lebih hati-hati dalam mengelola uang rakyat. Pertanggungjawaban keuangan melalui proses pengadaan yang terbuka itu sangat penting dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis.

Seperti diberitakan beberapa hari lalu, pembahasan mengenai APBD DKI Jakarta menjadi topik viral di media sosial. Selain pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar, publik juga mengkritik mata anggaran janggal yang lain, seperti pengadaan pulpen sebesar 123,8 miliar.

Topik tersebut menjadi viral setelah anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengunggah sejumlah kejanggalan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 melalui akun Twitter-nya, @willsarana, mulai Selasa (29/10). Setelah itu, tautan untuk mengakses rancangan KUA-PPAS 2020 di situs apbd.jakarta.go.id ditutup.

Terkait dua pejabat yang mengundurkan diri di tengah polemik pembahasan anggaran (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta Sri Mahendra Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi), Lisman menyampaikan, keputusan tersebut masih belum jelas. Ia berharap, peristiwa itu tidak mengganggu pihak lain dalam meneruskan perkara rencana anggaran Jakarta.

William Aditya Sarana berpendapat, kandidat yang berpotensi menjabat sebagai Kepala Bappeda ataupun Kepala Dinas Pariwisata harus memiliki kemampuan adaptasi yang cepat sehingga tidak mengganggu proses penyusunan anggaran yang tengah berlangsung. (AYU)